



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.

KESATU : Ketentuan angka 1, angka 10, dan angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2023

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | Peraturan Menteri | Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat | Mengatur Kriteria tentang lokasi yang bisa ditetapkan sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Pasal 5 ayat (3) Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. |
| 2. | Peraturan Menteri | Pelaksanaan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam | Tata Cara Pengangkatan dan pengangkutan BMKT | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Ranperpres Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. |
| 3. | Peraturan Menteri | Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah | 1. Peran Serta Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan | | | | | | | | | | | | | a. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN- |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | pengawasan PWP-3-K; dan 2. Pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K. | | | | | | | | | | | | | KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan b. Tindak lanjut dari Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. |
| 4. | Peraturan Menteri | Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi | 1. Standar infrastruktur pengelolaan, meliputi: | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | | a. infrastruktur untuk kepentingan SUOP; b. infrastruktur pariwisata; dan c. infrastruktur perikanan. 2. Standar pengelolaan perikanan berkelanjutan, meliputi: a. area budidaya; b. sertifikasi; dan c. daya dukung. 3. Standar pengelolaan pariwisata alam perairan, meliputi: a. lokasi kegiatan; b. sertifikasi; dan c. daya dukung. | | | | | | | | | | | | | Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025: a. Program I: Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi; b. Kegiatan I: Penyusunan regulasi tentang standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi per lokasi/wilayah; c. Sasaran I: Standardisasi infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi; d. Target/Output I: 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). |
| 5. | Peraturan Menteri | Penatausahaan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan | 1. Pemanfaatan pulau-pulau kecil; | | | | | | | | | | | | | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | Perairan di Sekitarnya | 2. Tata cara penerbitan izin dan rekomendasi; 3. Masa berlaku dan berakhirnya izin dan rekomendasi; 4. Pengawasan; dan 5. Sanksi administratif. | | | | | | | | | | | | | Perikanan Nomor 53/PERMENKP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMENKP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di Bawah 100 Km ² (Seratus Kilometer Persegi). |
| 6. | Keputusan Menteri | Penetapan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan | Menetapkan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 7. | Keputusan Menteri | Penetapan Organisasi Profesi | Menetapkan Organisasi Profesi Jabatan | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Peraturan Menteri |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir | Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir | | | | | | | | | | | | | Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 8. | Keputusan Menteri | Besaran Target Indikator Kinerja Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional | 1. Produksi garam pada SEGAR; 2. Kualitas garam pada SEGAR; dan 3. Penyerapan hasil produksi garam pada SEGAR. | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. |
| 9. | Keputusan Menteri | Sentra Ekonomi Garam Rakyat | Menetapkan lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. |
| 10. | Keputusan Menteri | Penetapan Kawasan Konservasi | 1. Penetapan kategori kawasan; 2. Penetapan zona; 3. Batas koordinat; dan 4. Peta. | | | | | | | | | | | | | Komulatif terbuka tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 11. | Keputusan Menteri | Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan yang Terancam Punah | Penetapan Jenis Ikan yang Terancam Punah | | | | | | | | | | | | | Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. |
| 12. | Keputusan Menteri | Penetapan Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut | Lokasi prioritas penyusunan dokumen perencanaan sedimentasi di laut oleh Tim Kajian | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut |
| 13. | Keputusan Menteri | Rencana Aksi Bulan Cinta Laut | 1. Gerakan peningkatan kesadaran; 2. Pengelolaan sampah pada kegiatan kelautan dan perikanan; 3. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut; dan 4. Mekanisme penguatan pengawasan dan/atau penegakan hukum serta kelembagaan. | | | | | | | | | | | | | 1. Setiap strategi berisi program dan rencana aksi; 2. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. |

10. Biro Keuangan

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | Peraturan Menteri | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Jenis Bantuan Pemerintah dengan karakteristik tertentu; 2. Perubahan masa Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah; 3. Perubahan Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah; 4. Perubahan bentuk pemberian Bantuan Pemerintah; dan 5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. |
| 2. | Peraturan Menteri | Pedoman Penatausahaan Persediaan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat pengurus persediaan; 2. Penyimpanan persediaan; 3. Pengamanan dan pemeliharaan persediaan; 4. Pendistribusian Persediaan; dan Penghapusan persediaan. | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 10b/LHP/XVII/05/2022 tentang Persediaan serta mewujudkan terciptanya tertib administrasi, fisik dan hukum dalam rangka pengelolaan BMN dipandang perlu menerbitkan aturan |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 3. | Keputusan Menteri | Utilisasi Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Menetapkan utilisasi penggunaan Barang Milik Negara antar kuasa pengguna barang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | Dalam rangka mewujudkan tertib fisik, administrasi dan hukum dalam pengelolaan BMN antar kuasa pengguna barang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |

11. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1. | Peraturan Menteri | Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan | Mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit organisasi pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Peraturan Presiden mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 2. | Peraturan Menteri | Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Mengatur mengenai tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 3. | Peraturan Menteri | Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan | Mengatur mengenai jenis jabatan Aparatur Sipil Negara dan besaran kelas jabatan masing- | | | | | | | | | | | | | Penyesuaian terhadap hasil evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional, dan |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | Kementerian Kelautan dan Perikanan | masing Aparatur Sipil Negara. | | | | | | | | | | | | | pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 4. | Peraturan Menteri | Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan | Mengatur mengenai tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan serta hubungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan organisasi profesi. | | | | | | | | | | | | | Pengaturan terhadap tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional dan hubungan kerjanya dengan Instansi Pembina, organisasi profesi wajib dibentuk dan difasilitasi oleh Instansi Pembina, oleh sebab itu perlu diatur tata cara pembentukannya. |
| 5. | Peraturan Menteri | Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Uji Kompetensi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Mengatur pelaksanaan penilaian kompetensi dan uji kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan. | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| 6. | Keputusan Menteri | Pendeklegasian Wewenang dalam Penandatanganan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang | Mengatur mengenai pendeklegasian wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk | | | | | | | | | | | | | Penyesuaian terhadap Kewenangan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang |

| NO. | JENIS PERATURAN | JUDUL | POKOK MATERI MUATAN | PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|-----------------|---|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------------------|
| | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| | | Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. | | | | | | | | | | | | | sumber daya manusia aparatur. |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana